

APBD 2012

PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NO. 1 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama. Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2012.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 27 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 35 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 36 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 37 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 38 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 46 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 47 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 51 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 52 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 54 Tahun 2007; Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 440-36 Tahun 2004.

- Peraturan ini mengatur tentang:
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 30 Januari 2012.

APBD 2013

PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NO. 5 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama. Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2013.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 27 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 35 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 36 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 37 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 38 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 46 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 47 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 51 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 52 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 54 Tahun 2007; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 16.a tanggal 2 Agustus 2012; Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 814-243 Tahun 2012.

- Peraturan ini mengatur tentang:
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2012.

APBD 2012 – PERTANGGUNGJAWABAN

PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NO. 6 TAHUN 2013

2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2012.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 02 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2012.
- Peraturan ini mengatur tentang:
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2012.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 17 Desember 2013.

APBD 2012 - PENJABARAN

PERBUP KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NO. 1 TAHUN 2012

2012

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK** : - Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2012, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 27 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 30 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 32 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 35 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 36 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 37 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 38 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 46 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 47 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 51 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 52 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 54 Tahun 2007; Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 440-36 Tahun 2004.

- Peraturan ini mengatur tentang:

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2012.

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 30 Januari 2012.

KEBIJAKAN AKUNTANSI - PENETAPAN

PERBUP KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NO. 3 TAHUN 2012

2012

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan dalam setiap transaksi yang terjadi baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun di masing-masing SKPD perlu adanya Kebijakan Akuntansi. Pelaksanaan kebijakan akuntansi harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 02 Tahun
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Pendahuluan;
 2. Ruang Lingkup; dan

3. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Mei 2012.